



Hakikat Pancasila dalam Membentuk Karakter Kebangsaan melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah

Fritz Hotman S. Damanik*

SMA Harapan Mandiri, Magister Sosiologi Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima Oktober 2014; Disetujui November 2014; Dipublikasikan Desember 2014

Abstrak

Sebagai salah satu dari empat panduan penting kehidupan berbangsa serta bernegara, Pancasila sejatinya harus serba hadir menyertai perjalanan maupun pergulatan hidup bangsa Indonesia. Namun, realitas justru menunjukkan betapa Pancasila kian diabaikan dan dilupakan. Akibatnya, beragam masalah pelik pun silih berganti mendera negeri. Sedemikian rumitnya permasalahan yang mendera negeri ini sehingga, pada Juni 2012, lembaga nirlaba *Fund for Peace* yang berpusat di Washington DC, Amerika Serikat, menempatkan Indonesia peringkat ke-63 dari 178 negara di seluruh dunia dalam Indeks Negara Gagal. Oleh sebab itu, tak ada pilihan selain kembali pada Pancasila, menyemainya hingga mengakar di sanubari kaum muda sebagai generasi penerus bangsa. Salah satu unsur di sekolah yang dapat diberdayakan untuk tujuan ini adalah Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).

Kata Kunci: Hakikat; Karakter; Pancasila

Abstract

As one of the four important guidances in the nation-state life, Pancasila should hopefully being present to accompany the national direction along its experience and struggle of life. However, the reality represents that how Pancasila actually more and more ingored and forgotten by the people instead. Consequently, many problems in turns suffers the nation-state. Such complex of the problems, result in an non-profit organisation centred in Washington named Fund for Peace in June 2012 positioned Indonesia on the rank of 63 of 178 countries in the world in the context of the Lost States Index. Therefore, there is not choice and exception beside to return to Pancasila, seeding it for enhancing in the wholeheart of the youth as the nation's next mandated generation. Then, in the school context, Students' Organisation of Internal of School (OSIS) for reaching could be used for achieving it.

Keywords: *Essence; Character; Pancasila*

How to Cite: Damanik, F.H.S. (2014). Hakikat Pancasila dalam Membentuk Karakter Kebangsaan melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6 (2): 49-60.

*Corresponding author.:

E-mail: fritdamanik@yahoo.co.id

p-ISSN 2085-482X

e-ISSN 2407-7429

PENDAHULUAN

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, misalnya, meniscayakan adanya sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Selain itu, juga ditekankan pentingnya membina kerukunan hidup serta jaminan kebebasan dalam melaksanakan peribadatan. Sayangnya, beragam kasus pelanggaran, penghambatan, dan intoleransi masih saja terjadi, hingga mengancam kebebasan beragama yang menjadi pilar utama terwujudnya kerukunan umat beragama.

Sejumlah peristiwa sempat pula marak diberitakan di media massa nasional, antara lain, penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah di Kampung Peundeuy, Umbulan, Cikeusik, Pandeglang, Banten (6 Februari 2012). Bentrokan kelompok muka dengan kelompok belakang terkait perbedaan keyakinan, khususnya dalam menentukan hari besar agama di Pulau, Maluku Tengah (10 Februari 2012). Penyerangan terhadap warga *Syiah* di Dusun Nangkernang, Karanggayam, Omben, Sampang, Jawa Timur (25 Agustus 2012). Bentrokan berdarah antara warga dengan kelompok yang dituduh aliran sesat pimpinan Teungku Aiyub Syakuban di Desa Jambo Dalam, Plimbang, Bireuen, NAD (18 November 2012). Kontroversi terkait keberadaan Gereja Kristen Indonesia Yasmin (Bogor, Jawa Barat) dan Huria Kristen Batak Protestan Filadelfia (Tambun Utara, Bekasi). Jemaat kedua gereja tersebut, hingga kini, belum dapat melaksanakan peribadatan di lokasi gereja akibat adanya penolakan juga intimidasi dari warga masyarakat.

Yang lebih memprihatinkan lagi, sejumlah hasil survei menemukan kecenderungan sikap intoleran di kalangan kaum muda. Survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) yang dilakukan sejak Oktober 2010 hingga Januari 2011, misalnya, menunjukkan bahwa di antara 993 siswa (sekolah menengah pertama kelas VIII dan IX serta sekolah menengah atas semua kelas) yang disurvei, 40,7% tak menginginkan berdirinya tempat ibadah non-Islam di lingkungan mereka, sementara 36,9% menolak bertoleransi dalam perayaan keagamaan lain di lingkungan mereka. Lebih jauh lagi, 25,8% siswa menganggap

Pancasila tidak lagi relevan sebagai ideologi negara.

Keresahan kian mencekam jika mengingat bahwa sebagian pelaku terorisme dan radikalisme adalah para pemuda. Pada tahun 2007, Isa Anshori (16) dan Nur Fauzan (19) diringkus oleh Detasemen Khusus 88 (Densus 88) Kepolisian RI karena diduga terlibat menyembunyikan Taufik Kondang, salah seorang anggota jaringan teroris komplotan Abu Dujana. Sekira Juli 2009, terungkap bahwa salah satu pelaku pengeboman di Hotel JW Marriot, Jakarta ialah Dani Dwi Permana yang masih berusia 18 tahun. Sementara pada 25 Januari 2011, Arga Wiratama (17) dan beberapa orang lainnya dibekuk oleh Densus 88 terkait kasus teror bom di wilayah Klaten, Sleman, dan Yogyakarta.

Sementara itu, Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab pun juga merupakan nilai kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya, kini jauh panggang dari api. Kekerasan demi kekerasan terus terjadi di Indonesia. Intensitasnya pun cenderung menunjukkan peningkatan dan bukan sebaliknya. Banyak korban yang telah jatuh karena berbagai konflik politik, etnis, dan agama. Masyarakat kita, akhir-akhir ini, mu dah meledak karena sebab sepele, tidak sabar, agresif, dan mudah rusuh.

Masyarakat, termasuk kaum muda, memang tampaknya semakin mudah terpancing untuk berkonflik dan melakukan kekerasan. Kekerasan seakan telah menjadi bahasa yang lazim digunakan dan mereka yang menggunakannya sama sekali tidak menyadari bahwa kekerasan takkan pernah menyelesaikan masalah melainkan malah memperumit keadaan. Semua ini mengindikasikan, kekerasan telah diterima oleh sebagian masyarakat kita sebagai suatu kebiasaan, yang bukan kejahatan, tetapi dijadikan santapan sehari-hari dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup (Wahyu, 2011). Ironisnya, kekerasan bukan hanya dipraktikkan oleh masyarakat, tetapi para oknum elite politik pun tak jarang memanfaatkannya demi menangguk keuntungan jangka pendek.

Kekerasan kerap mewujud pula sebagai penanda kegagalan memahami keberbagaian.

Kekerasan timbul karena segelintir anggota masyarakat sulit menerima keberbagaian. Mereka ini, akibat keterbatasan pemahaman, cenderung menganggap bahwa orang yang berbeda (suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit) harus dijauhi, didiskriminasi, atau dimusuhi. Mereka enggan menerima kebenaran dari keberbagaian, sebab merasa dirinya sebagai pemilik tunggal kebenaran.

Sila Persatuan Indonesia yang menuntut setiap warga negara agar mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan, nyaris terlupakan pula. Riak konflik telah mencuatkan benih-benih perpecahan di sepenjuru Indonesia. Otonomi dan desentralisasi, yang semestinya dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya kemakmuran juga peningkatan kesejahteraan pada berbagai bidang kehidupan, malah dibajak oleh ego elite politik daerah yang mengusung sentimen primordial, hingga mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu, keharusan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, sebagaimana diamanatkan oleh Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan semakin jarang dipraktekkan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pemaksaan kehendak atau perdebatan tak berujung kerap terjadi hingga semakin menjauhkan semangat kekeluargaan yang seharusnya dikedepankan. Akal sehat serta hati nurani hampir selalu dikalahkan oleh kepentingan sesaat.

Adapun sistem voting (pengambilan keputusan dengan memperhatikan suara terbanyak), yang sering dijadikan pilihan dalam pengambilan keputusan, tak ayal menciptakan tirani mayoritas. Maka, tidaklah mengherankan jika keputusan yang diambil pun sulit dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, gagal menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, lalai memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan

keadilan, sekaligus luput mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

Cita-cita luhur untuk mewujudkan kemajuan merata dan berkeadilan, seperti terkandung dalam Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, berulang kali ternodai oleh pemerasan, pemborosan, serta gaya hidup mewah. Yang lebih memprihatinkan lagi, hal-hal tersebut kerap dilakukan oleh kaum muda. Berkembang pesatnya budaya urban telah menjadikan kegiatan bersenang-senang atau hura-hura sebagai favorit bagi kaum muda. Sementara kerja keras, kegotongroyongan, dan kegemaran memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat mandiri (baca : terentaskan dari kemiskinan), yang jauh dari hingar-bingar urbanisme, justru kian ditinggalkan dan dilupakan.

Sedemikian rumitnya permasalahan yang mendera negeri ini sehingga, akhir Juni 2012 lalu, lembaga nirlaba *Fund for Peace* yang berpusat di Washington DC, Amerika Serikat, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-63 dari 178 negara di seluruh dunia dalam Indeks Negara Gagal. Walau predikat sebagai negara di ambang gagal ini mengundang banyak bantahan dan gugatan, terutama dari pemerintah Indonesia, namun setidaknya dapat memberi gambaran betapa pengabaian Pancasila telah menggiring bangsa Indonesia menjauh dari cita-cita luhur para pendirinya. Oleh sebab itu, tak ada pilihan selain kembali menghayati Pancasila, menyemainya hingga mengakar di sanubari kaum muda sebagai generasi penerus bangsa, demi tetap kokohnya persatuan dan kesatuan Indonesia.

Berdasarkan pembahasan latar belakang di atas, dapat diambil pokok penting sebagai perumusan masalah yaitu: Apakah yang dapat dilakukan untuk menyemai Pancasila hingga mengakar di sanubari kaum muda sebagai generasi penerus bangsa?

METODE PENELITIAN

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai upaya untuk mendapatkan atau memperoleh informasi yang diperlukan dan memastikannya terjaring sebaik mungkin. Adapun teknik yang digunakan oleh penulis adalah Metode

Observasi dan Study Pustaka. Metode observasi ini dimaksudkan untuk mengamati suatu gejala sosial yang terjadi di masyarakat, yakni realitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang menyangkut dengan masalah yang ditulis melalui penelusuran pustaka dan sumber sekunder lainnya.

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya dibaca, dipelajari, ditelaah, serta direduksi guna memperoleh rangkuman inti dari data. Tahap akhir ialah melakukan interpretasi terhadap data, hingga sampai pada konsep-konsep pemecahan masalah secara tuntas dan menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kaum muda dan Pancasila. Sulit membayangkan bisa menyandingkan keduanya, terlebih di era modernisasi saat ini. Tak dapat dipungkiri, terlepas dari maraknya gerakan revitalisasi dan penghayatan kembali Pancasila yang digagas oleh organisasi kemahasiswaan atau kepemudaan, sebagian kaum muda justru tampaknya belum menganggap nilai-nilai luhur Pancasila sebagai hal yang penting.

Seperti yang termaktub dalam Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Sebagai dasar negara, proses lahirnya Pancasila sedemikian panjang perjalanannya. Ketika BPUPKI mengadakan sidangnya yang pertama pada tanggal 29 Mei 1945, beberapa tokoh berbicara dalam sidang tersebut, mengemukakan pemikirannya mengenai dasar negara Indonesia. Salah satu di antaranya adalah Mr. Muhammad Yamin. Beliau mendapat kesempatan pertama menyampaikan pidatonya di hadapan sidang lengkap BPUPKI. Pidatonya berisi lima dasar untuk negara Indonesia merdeka yang diidamkan, yaitu : Peri Kebangsaan; Peri Kemanusiaan; Peri Ketuhanan; Peri Kerakyatan; dan Kesejahteraan

Pidato tersebut beliau menyampaikan usul tertulis mengenai rancangan UUD Republik Indonesia dalam pembukaan yang tercantum perumusan lima dasar negara, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa; Kebangsaan persatuan Indonesia; Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan

perwakilan; dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan pidatonya di hadapan sidang hari ketiga BPUPKI. Dalam pidatonya, beliau mengusulkan lima hal untuk menjadi dasar negara Indonesia merdeka, dengan rumusannya sebagai berikut: Kebangsaan Indonesia; Internasionalisme (Peri Kemanusiaan); Mufakat (Demokrasi); Kesejahteraan sosial; dan Ketuhanan yang berkebudayaan. Untuk lima dasar negara tersebut, beliau mengusulkan pula agar dinamai Pancasila, yang menurutnya disarankan oleh sahabatnya, seorang ahli bahasa. Lima prinsip sebagai dasar negara itu, selanjutnya dapat dirangkum menjadi Tri Sila, yaitu Sosio Nasionalisme (Kebangsaan), Sosio Demokrasi (Mufakat), dan Ketuhanan. Kemudian, Tri Sila dapat diringkas lagi menjadi Eka Sila yang berintikan gotong royong.

Dari persidangan selanjutnya, dihasilkanlah sebuah piagam yang selanjutnya dikenal sebagai Piagam Jakarta) berikut: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setelah BPUPKI selesai melaksanakan tugasnya, maka dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang dan mengesahkan rancangan undang-undang dasar yang dihasilkan BPUPKI, dimana Pancasila termuat dalam bagian Pembukaan, di alinea keempat, dengan sedikit penyesuaian sesuai masukan dari berbagai pihak. Adapun rumusan Pancasila yang otentik, dimuat dalam Pembukaan UUD 1945, yakni :Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejak saat itu, Pancasila resmi diakui sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsekuensinya, Pancasila pun serba hadir dalam

kehidupan bernegara, yaitu menjadi sumber dari segala sumber hukum dan Pancasila adalah cita hukum (*rechtsidee*). Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum atau norma fundamental negara (*groundnorms* atau *staatsfundamentalnorm*) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa Pancasila merupakan sumber norma bagi UUD 1945 sebagai konstitusi negara dan peraturan perundang-undangan lain di bawahnya. Ketika Pancasila menjadi cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Cita hukum berarti gagasan, pikiran, rasa, dan cipta mengenai hukum yang seharusnya diinginkan masyarakat. Cita hukum mengarahkan hukum kepada cita-cita dari masyarakat bersangkutan.

Pancasila sebagai cita hukum memiliki dua fungsi, yakni *Fungsi regulatif* dan *Fungsi konstitutif*. *Fungsi regulatif*, artinya menguji apakah hukum yang dibuat adil atau tidak bagi masyarakat. *Fungsi konstitutif*, artinya mengingatkan bahwa tanpa dasar cita hukum maka hukum yang dibuat akan kehilangan maknanya sebagai hukum.

Pancasila merupakan landasan dasar filosofi yang mengandung kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih lanjut, misalnya menyangkut pembagian kekuasaan negara, hubungan antar lembaga negara, serta hubungan negara dengan warganya.

Kaum muda, yang dalam hal ini dikaitkan dengan Pembinaan Kesiswaan melalui OSIS yang biasa dilakukan di sekolah-sekolah, hal ini juga menjadi perhatian yang penting bagi pembinaan karakter kebangsaan. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan pada Pasal 1 disebutkan bahwa tujuan pembinaan kesiswaan. Antara lain adalah: Mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas; Memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatif yang bertentangan dengan tujuan pendidikan; Mengaktualisasikan potensi siswa dalam pencapaian prestasi unggulan sesuai bakat dan minat; Menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia,

demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani (*civil society*).

Adapun kegiatan pembinaan kesiswaan tersebut, salah satunya, dilakukan melalui wadah Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) sebagai organisasi resmi di sekolah dan tidak memiliki hubungan organisatoris dengan organisasi kesiswaan di sekolah lain.

Mengenai susunan kepengurusan OSIS, memang tidak ada aturan baku yang mengaturnya sebab lazimnya disesuaikan dengan situasi daerah maupun sekolah masing-masing. Namun, secara umum, kepengurusan OSIS terdiri dari Pembina (guru yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah), Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, juga beberapa Ketua Sie (Sie Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sie Wawasan Keilmuan, Sie Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme, Sie Apresiasi Seni Budaya dan Daya Kreasi, Sie Olahraga dan Kesehatan).

Dalam sebuah survei sederhana yang diadakan oleh OSIS SMA Harapan Mandiri, Medan pada Agustus 2014 terhadap 300 orang siswa, dari kelas X hingga XII, terungkap fakta bahwa mereka kebanyakan tidak memahami makna penting Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (68%). Hanya sebagian kecil saja (31%) yang dapat mendeskripsikan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup.

Ketika digali lebih mendalam mengenai penghayatan terhadap Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, diperoleh temuan yang cukup mengejutkan. Memang, hampir seluruh responden menyadari bahwa keberagaman agama adalah suatu hal yang harus diterima sebagai keniscayaan di Indonesia (99,33%). Hanya segelintir saja (0,67%) yang merasa bahwa Indonesia akan lebih baik bila bercorak monoreligi atau terdiri dari satu agama saja.

Uniknya, meski hampir semua (99,33%) sepakat bahwa keberagaman agama adalah suatu hal yang harus diterima, ternyata mereka masih gemar bersikap diskriminatif terhadap kelompok lain. Sebagian responden (82%) merasa lebih nyaman bergaul dengan teman-teman seagama. Mayoritas responden (86%) juga menolak mengucapkan selamat pada perayaan hari besar

keagamaan lain. Bahkan, ada yang menganggap (80%) bahwa berpartisipasi dalam perayaan hari besar keagamaan lain, semisal membantu pelaksanaannya atau ikut mengamatkannya, adalah perbuatan dosa.

Walau hasil survei ini belum memenuhi syarat untuk digeneralisasikan, tapi setidaknya mampu memberi gambaran betapa penghayatan terhadap nilai-nilai luhur Pancasila belum mengakar dalam sanubari kaum muda di tengah sikap acuh dan ketidaktelitian mereka.

Apakah yang bisa dilakukan demi menyemai Pancasila hingga mengakar di sanubari kaum muda sebagai generasi penerus bangsa? Salah satu unsur di sekolah yang dapat diberdayakan adalah Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Mengapa OSIS? Jawabannya karena, sebagai satu-satunya organisasi resmi kesiswaan di sekolah, OSIS dan segenap jajaran pengurusnya berpotensi mengambil peran signifikan dalam mempengaruhi sikap maupun perilaku siswa/i lainnya.

Pemberdayaan OSIS untuk menyemai Pancasila juga dipandang bersesuaian dengan tujuan pembinaan kesiswaan. Bagaimana pun, akhlak mulia, sikap demokratis, dan penghormatan hak-hak asasi manusia, yang ingin dibentuk melalui pembinaan kesiswaan, dapat ditemui dalam kelima sila Pancasila. Maka, sejatinya pembinaan kesiswaan adalah jika dijiwai oleh keluhuran Pancasila.

Ambil contoh sang Ketua OSIS. Di kebanyakan SMA seluruh Indonesia, seorang Ketua OSIS lazimnya dipilih langsung oleh seluruh siswa/i sebagai bentuk pembelajaran berdemokrasi. Namun, pemilihan Ketua OSIS sama sekali tak seperti pemilihan Kepala Daerah yang disarati politik uang, pengerahan birokrat demi menggalang dukungan, kampanye negatif, maupun upaya memanfaatkan isu etnisitas (putra daerah), agama, atau golongan. Seorang Ketua OSIS biasanya terpilih karena kemampuannya menampilkan generalitas gemerlap dan merangsang keikutsertaan. Keduanya, dengan sedikit penyesuaian, dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya menyemai Pancasila hingga mengakar di sanubari kaum muda sebagai generasi penerus bangsa.

Mari kita simak yang pertama, yakni generalitas gemerlap. Dalam hal ini, seorang Ketua OSIS biasanya terpilih karena mampu melekatkan diri dengan suatu citra atau pandangan positif, untuk menarik sebanyak mungkin simpati dan dukungan. Ia bisa saja menyebut dirinya sebagai "calon Ketua OSIS yang akan membawa perubahan" atau "calon Ketua OSIS yang berpihak pada kepentingan siswa". Generalitas gemerlap ini kelak, jika ia telah terpilih, dapat dimanfaatkan untuk mengkampanyekan berbagai hal semisal dengan mengusung tema, "Keluhuran nilai-nilai Pancasila jua yang menginspirasi saya hingga terpilih menjadi Ketua OSIS, maka mari selalu hayati Pancasila dalam seluruh sendi kehidupan" atau "Nilai-nilai luhur Pancasila harus disemai di sanubari setiap anak bangsa, mari berdayakan OSIS untuk menghayati kembali Pancasila demi tetap kokohnya persatuan dan kesatuan Indonesia."

Ketua OSIS terpilih dapat pula memanfaatkan keterampilannya merangsang keikutsertaan demi membantu menyemai Pancasila. Hal ini karena, pada dasarnya, semua orang memiliki kecenderungan untuk mengikuti arus pendapat umum. Jika saat berkampanye, ia mengatakan bahwa "Saya sudah didukung oleh begitu banyak siswa, bagaimana dengan kamu?" atau "Ikutilah langkah mereka yang sudah menentukan pilihan tepat, yakni dengan memilih saya!". Setelah berhasil terpilih, ia bisa sedikit menyesuaikan ucapannya, "Saya selalu bersikap dan berperilaku sesuai tuntunan nilai-nilai luhur Pancasila, bagaimana dengan kamu?" atau "Jutaan kaum muda di seluruh Indonesia telah bergiat mempelajari dan menghayati kembali Pancasila, tunggu apa lagi?"

Agar untaian ajakan menghayati kembali Pancasila tak hanya sebatas kata tanpa makna, Ketua OSIS harus mampu menunjukkan keteladanan melalui keterampilan serta kesediaan untuk memimpin dengan hati.

Walau terdengar rumit, memimpin dengan hati sesungguhnya tak terlalu sulit diterapkan. Untuk melakukannya, seorang Ketua OSIS terlebih dahulu mesti mengembangkan kemampuan menghargai perbedaan dan memupuk nilai universalisme yang dinafasi Pancasila. Mengutip

Robert Dreeben (dalam Sunarto, 2004 : 28), dalam nilai universalisme, seseorang dituntut memperlakukan semua orang secara bersamaan, tanpa membedakan latar belakang mereka. Maka dari itu, Ketua OSIS semestinya menempatkan diri sebagai pengayom bagi siswa/i dari berbagai ras, suku, agama, golongan, maupun lapisan sosial.

Secara konkret, Ketua OSIS mesti memastikan bahwa tiap pelaksanaan kegiatan OSIS senantiasa melibatkan seluruh siswa/i sesuai minat dan kesanggupannya. Dalam pengambilan keputusan keorganisasian, sebaiknya diupayakan melalui musyawarah demi mencapai mufakat. Kalau pun terpaksa melakukan voting, hendaknya aspirasi pihak minoritas tetap diperhatikan dan diakomodir.

Selanjutnya, Ketua OSIS harus pula terampil mengelola potensi konflik dan perbedaan yang mungkin memicu perselisihan. Caranya cukup sederhana, yaitu jeli mencari titik persamaan dari sekian banyak perbedaan. Jika ternyata ditemui bahwa meski memiliki cara pandang berbeda, tapi berbagi tujuan akhir yang sama, maka fokus bisa diarahkan pada upaya mengkoordinasikan berbagai kegiatan demi mewujudkan kesamaan tujuan dimaksud.

Untuk memimpin dengan hati, seorang Ketua OSIS juga selayaknya selalu menjaga konsistensi antara pernyataan dan tindakan. Jangan menyebut diri peduli pada kepentingan siswa/i lain jika ternyata masih ingin dilayani, bukannya melayani. Jangan mengaku demokratis, bila gemar memaksakan kehendak kepada orang lain. Jangan mengumbar janji dapat membawa nama baik sekolah di tengah masyarakat apabila nyatanya lebih banyak melakukan hal-hal tak bermanfaat ketimbang berupaya menggagas berbagai kegiatan yang turut berkontribusi membawa kemajuan merata dan berkeadilan sosial dimulai dari lingkungan sekitar sekolah.

Ketulusan dan keikhlasan adalah unsur berikutnya dari kepemimpinan dengan hati. Kedua unsur tersebut sejatinya sangat berharga dalam mewujudkan harmoni dalam pergaulan. Mengapa demikian? Tak lain karena nilai-nilai luhur hubungan sosial yang dijiwai Pancasila seperti toleransi, pluralisme, ketulusan, serta keikhlasan merupakan wujud dari keadaban, dalam arti

bahwa masing-masing pribadi atau kelompok pada suatu lingkungan interaksi sosial memiliki kesediaan memandang sesamanya dengan penghargaan, tanpa saling memaksakan kehendak, pendapat, atau pandangan sendiri.

Nilai luhur yang dijiwai Pancasila tersebut tidak jauh berbeda dengan pendidikan multikulturalisme yang apabila dikembangkan di sekolah, juga akan dapat memperkuat nilai-nilai luhur hubungan sosial siswa. Pendidikan multikultural yang diselenggarakan dalam upaya mengembangkan kemampuan siswa dalam memandang kehidupan dari berbagai perspektif budaya yang berbeda dengan budaya yang mereka miliki, dan bersikap positif terhadap perbedaan budaya, ras dan etnis. (Octaviani, L., 2013)

Bukan hanya Ketua OSIS. Jika memang memiliki kepedulian pada upaya menyemai Pancasila hingga mengakar di sanubari kaum muda sebagai generasi penerus bangsa, pengurus OSIS lainnya pun dapat pula memberdayakan diri sesuai bidang tugas masing-masing. Sie Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, khususnya Sub Sie Agama Islam, pada awalnya, dapat mengawali dengan mengutip ajaran Islam bahwa, secara umum, setiap umat Islam wajib mendukung kebaikan dan menegakkan kebenaran (*amar ma'ruf nahi munkar*). Nilai-nilai luhur Pancasila jelas mengandung kebaikan universal, sehingga layak didukung.

Lebih lagi, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sesungguhnya berpadanan dengan ajaran Islam. Sila pertama yang menegaskan keesaan Tuhan dapat ditemui kesesuaiannya pada firman Allah SWT, "*Tuhan-Mu adalah Tuhan yang Wahid, tiada Tuhan selain Dia, Dia Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang*" (QS Al-Baqarah [2]: 163). Sila kedua Pancasila sejalan dengan QS Ar-Rahman: 8, yakni "*Tegakkanlah timbangan dengan keadilan dan jangan sekali-kali kamu berlaku curang dalam timbangan.*" Sementara sila ketiga dapat ditemui padanannya pada Q.S Ali-Imran: 103 yang berbunyi, "*Berpegang teguhlah kamu dengan agama Allah dan jangan kamu berpecah belah*".

Mengenai prinsip musyawarah demi mufakat yang digariskan sila keempat Pancasila sejatinya telah dipraktekkan sejak dahulu dalam

sejarah Islam. Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam setiap urusan, *“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu”* (QS Ali ‘Imran : 159). Hal senada termuat dalam QS Al-Syura’ : 38, *“Orang-orang yang mematuhi seruan mereka, mendirikan shalat, serta urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antar mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”*. Para ulama besar pun sepakat bahwa musyawarah merupakan hal penting. Ibnu Abi Syaibah, misalnya, menyatakan bahwa setiap kaum yang bermusyawarah niscaya akan dibimbing sehingga mampu melaksanakan keputusan terbaik dalam segala permasalahan mereka.

Adapun prinsip keadilan sosial yang termuat dalam sila kelima sejatinya telah diwajibkan oleh Allah SWT kepada seluruh umat Islam. *“Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendati pun dia adalah kerabatmu”* (QS Al-An‘am [6] : 152); *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan”* (QS An-Nisa’ [4] : 135); dan *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan”* (QS An-Nahl [16] : 90).

Penghayatan terhadap ajaran Islam tadi selanjutnya perlu diarahkan agar menekankan pada nilai-nilai substantif (bukan formalis, simbolis, atau eksklusif), menampilkan wajah ramah agama, toleran, dan menghargai perbedaan. Diharapkan, selain membantu menyemai Pancasila, juga akan menciptakan harmoni dalam pergaulan di sekolah yang nantinya dapat ditularkan kepada masyarakat luas.

Sementara itu, Sie Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme dapat menindaklanjuti dengan mengangkat fakta bahwa upaya menyemai Pancasila hingga mengakar di sanubari kaum muda sama saja artinya mencintai Indonesia. Bagaimana pun, Indonesia sebagai masyarakat multikultural, pada perkembangannya, akan

bersinggungan dengan konsep hidup bersama, untuk mencari kehidupan bersama. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu ideologi yang mengandung nilai universal sehingga dapat diterima oleh semua pihak.

Dalam hal ini, Pancasila merupakan ideologi paling tepat karena mampu mengakomodir kearifan lokal masyarakat Indonesia, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menginspirasi berbagai aspek kehidupan, sekaligus menghargai keberagaman dan mampu mengarahkannya demi mendukung pencapaian cita-cita luhur sebagai bangsa. Maka, kaum muda yang mengaku mencintai negerinya sudah selayaknya bergiat mempelajari Pancasila, meningkatkan penghayatan terhadapnya, serta mengimplementasikannya dalam sikap dan perilaku keseharian, dimulai dari lingkungan sosial terkecilnya.

Rasa kebangsaan yang menekankan kesatuan dan persatuan serta penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan secara universal pun perlu terus dikembangkan oleh Sie Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme. Sesama manusia seharusnya dihormati bukan karena latar belakangnya, melainkan sehubungan harkat kemanusiaan (hak asasi manusia) yang melekat padanya. Nilai kebenaran dan kebaikan dalam etika hubungan antar manusia tidak boleh dikembangkan atas dasar kepentingan kelompok atau golongan tertentu, melainkan didasarkan pada obyektivitas yang bersumber dari kebenaran transenden bersifat mutlak, berlaku secara universal, dan tidak dibatasi oleh ruang atau pun waktu.

Bagaimana halnya dengan Sie Wawasan Keilmuan? Sie ini lazimnya bertugas menumbuhkan semangat mengembangkan penguasaan ilmu dan mengasah kemampuan melalui kompetisi dengan siswa/i lainnya baik dalam satu sekolah maupun antar sekolah. Kompetisi akan memungkinkan bertumbuhnya semangat kerja keras serta sikap menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan serta kesejahteraan bersama. Selain itu, diyakini juga semakin memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Secara berkala, bekerja sama dengan Sie Apresiasi Seni Budaya dan Daya Kreasi, Sie Wawasan Keilmuan juga bertanggung jawab mengisi rubrik pendidikan di mading sekolah. Sesekali, rubrik pendidikan tersebut dapat juga diarahkan untuk memuat berbagai artikel mengenai esensi Pancasila yang serba hadir dalam beragam budaya tradisi atau pun kearifan lokal Indonesia. Jika memungkinkan, pengembangan budaya tradisi tertentu bisa saja dijadikan sebagai kegiatan ekstrakurikuler yang diwadahi oleh Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).

Awalnya adalah Tari Tor-tor dari Sumatera Utara. Pada tarian yang bercirikan hentakan kaki penarinya di atas papan rumah adat Batak, dengan diiringi tabuhan gendang (jumlah gendang yang ditabuh berjumlah dua, enam, tujuh, delapan, atau sembilan) sesungguhnya terkandung pesan religius agar manusia senantiasa mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, manusia juga diharuskan menghargai sesamanya tanpa membeda-bedakan latar belakang apa pun. Jika dijaga tetap lestari, Tari Tor-tor dapat diarahkan untuk membantu mengelola keberagaman agama secara kreatif, sehingga potensi konflik yang muncul sebagai dampak dari keberagaman dapat dikelola secara cerdas dan menjadi bagian dari pencerahan kehidupan bangsa di masa depan.

Selain itu, ada Tari Kecak (Bali) yang lazimnya mengambil lakon Ramayana. Melalui berbagai adegan, manusia diingatkan untuk selalu setia dan rela berkorban demi keselamatan sesama. Unsur bunyi serta gerak yang dilakukan secara seragam dan bersamaan, sebagai ciri khas Tari Kecak, juga menjadi pengingat bagi seluruh umat manusia agar selalu berusaha mengembangkan juga mempertahankan persaudaraan universal. Dalam persaudaraan universal, kemajuan salah satu pihak dipandang sebagai kemajuan bersama dan dapat dimanfaatkan demi mengangkat harkat sesama. Hal dimaksud juga diingatkan oleh kearifan lokal yang berkembang di Sumatera Utara (*adat hidup berkaum bangsa, sakit senang sama dirasa, adat hidup berkaum bangsa, tolong menolong rasa merasa*).

Beralih selanjutnya pada nilai cinta tanah air serta kerelaan berkorban demi kepentingan

bangsa dan negara, yang dapat ditemui pada berbagai lakon Wayang Kulit. Di dunia pewayangan, bela negara merupakan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat. Selain mempertahankan keutuhan wilayah (kerajaan, pertapaan, atau lainnya), rakyat juga harus memiliki kepatuhan terhadap pemerintah (Raja). Ketika sentimen primordial dan ego golongan mencuat hingga menimbulkan potensi disintegrasi, kearifan dunia pewayangan ini dapat mengingatkan betapa persatuan dan kesatuan harus senantiasa ditempatkan di atas segalanya.

Bukan hanya lakon Wayang Kulit saja. Sejumlah lakon Wayang Orang pun nyaris selalu mengangkat tema bela negara. Sebut saja, misalnya, lakon Gatotkaca Krida yang pernah dipentaskan di Gedung Wayang Orang Sriwedari, Solo, Jawa Tengah. Lakon Gatotkaca Krida mengajak anak muda untuk mengembangkan tanggung jawab bela negara, sebagaimana ditunjukkan oleh dedikasi tokoh Gatotkaca (bersama Pandawa) menjaga kedaulatan Amarta dari serangan Astina. Tak hanya unjuk kekuatan, ditekankan pula pentingnya mempertahankan kerukunan antar sesama anak negeri. Suatu negara boleh mengaku kuat serta berjaya bila telah mampu mewujudkan kerukunan dalam masyarakat. Melalui kerukunan yang membuahkan solidaritas, setiap potensi serangan akan dapat segera ditangkal. Ini ditegaskan pula oleh kearifan lokal etnis Batak Karo yang menekankan pentingnya '*bagi buluh belin sada ndapuren*' (kekuatan bersama dan persatuan).

Sementara nilai musyawarah, di antaranya, telah diterapkan secara turun-temurun dalam sistem subak di Bali (pengelolaan irigasi persawahan secara komunal yang menjadi perekat sosial dan ketahanan pangan). Persepakatan untuk menanam varietas padi yang sama dan pembagian air melalui kongregasi anggota subak hingga mampu menghalau hama atau penyakit tanaman, yang pada gilirannya mendatangkan kemakmuran melalui hasil panen berlimpah, merupakan pembuktian betapa musyawarah akan menghasilkan kebaikan.

Semburat nilai tolong-menolong dan kerja keras dapat ditemukan dalam Tari Tarek Pukat dari Aceh yang mempertunjukkan bagaimana

seutas tali dapat dijalin menjadi sebuah jaring penangkap ikan. Makna filosofisnya adalah bahwa tolong-menolong dan kerja keras akan mampu mendatangkan kemakmuran yang berkeadilan bagi semua. Masing-masing orang dipastikan mendapat bagian dari hasil kerja bersama. Dengan demikian, takkan ada lagi kesenjangan atau kecemburuan sosial yang melahirkan pertikaian.

Sie Apresiasi Seni Budaya dan Daya Kreasi pun dapat turut ambil bagian dalam menyemai Pancasila hingga mengakar di sanubari kaum muda. Di antaranya, dengan menggagas semacam pentas seni atau ajang unjuk kreativitas bertemakan 'Cintai dan Hayati Pancasila'. Jika digelar *Rap Competition*, misalnya, peserta bisa diminta memasukkan sejumlah kata kunci terkait pentingnya kaum muda menghayati kembali Pancasila. Bila diadakan Festival Band, peserta dapat diwajibkan membuat jingle singkat ciptaan sendiri demi menggelorakan semangat mempelajari dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila. Jika digelar *Cheerleaders Competition*, tiap kelompok *cheers* diharuskan membuat yel-yel berisi ajakan mencintai Pancasila. Berbekal sedikit kreativitas, upaya menyemai Pancasila sesungguhnya bisa dipadukan dengan berbagai unsur modernitas.

Yang terakhir, tapi dapat pula berperan penting, ialah Sie Olahraga dan Kesehatan. Dalam hal ini, terlebih dahulu memang dibutuhkan kerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) pada pemerintah daerah, Dinas Pendidikan setempat, kalangan akademisi perguruan tinggi, maupun lembaga swadaya masyarakat penggiat revitalisasi Pancasila, yang memiliki sumber daya memadai untuk memberikan pelatihan guna meningkatkan pemahaman anggota Sie Olahraga dan Kesehatan mengenai penghayatan nilai-nilai luhur Pancasila serta wujud penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mereka ini nantinya akan menjadi Kader Cinta Pancasila yang diterjunkan sebagai pendidik sebaya (*peer educator*) demi menggelorakan semangat mempelajari juga menghayati Pancasila di kalangan kelompok sebayanya.

Mengapa pendidik sebaya (*peer educator*) diperlukan? Setidaknya ada tiga alasan yang dapat

dikemukakan. *Pertama*, karena pendidik sebaya menggunakan bahasa yang kurang lebih sama sehingga informasi tentang pentingnya menghayati Pancasila akan mudah dipahami oleh sebayanya. *Kedua*, remaja lebih terbuka untuk mengemukakan pikiran dan perasaannya di hadapan pendidik sebayanya, termasuk bila pernah mendengar persepsi keliru mengenai Pancasila (misalnya, ada pihak yang berpendapat bahwa Pancasila adalah *thaghut* atau sesembahan sehingga lantas mengharamkannya). Dan yang *ketiga*, pesan-pesan penting mengenai keluhuran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sekaligus penerapannya sebagai solusi dari bermacam problematika kebangsaan dapat disampaikan serta didiskusikan secara santai, namun tetap bermakna.

Tak hanya itu, Sie Olahraga dan Kesehatan bersama Sie lainnya dapat rutin menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bersama untuk memajukan pergaulan, sekaligus menjembatani jurang pemisah (*gap*) yang mungkin masih menjadi penyebab kesenjangan antar siswa/i maupun antara siswa/i dengan warga sekitar. Batas-batas sosial yang menghambat terwujudnya hubungan baik akan sirna apabila terdapat suatu arena interaksi yang mengakomodasi sikap tidak bersahabat. Hal ini, secara sederhana, dapat dilakukan melalui pertandingan olahraga antar kelas, bakti sosial, atau bina lingkungan.

Dengan melibatkan OSIS dalam upaya menyemai Pancasila, tanpa disadari sesungguhnya telah tercapai dua tujuan sekaligus, yakni semakin mengakarnya Pancasila di sanubari kaum muda dan terbentuknya sejumlah karakter unggulan. Beberapa karakter yang tampak nyata pada uraian sebelumnya, antara lain, peduli sosial, religius, toleransi, semangat kebangsaan, cinta tanah air, tanggung jawab, rasa ingin tahu, kreatif, kerja keras, dan mandiri.

Karakter-karakter unggulan tersebut diyakini sejumlah pihak sebagai solusi terbaik untuk menghindari kebangkrutan peradaban bangsa Indonesia akibat banyaknya generasi muda yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tanpa karakter atau nilai sebagai pedoman bersikap serta berperilaku.

Sedemikian pentingnya pembentukan karakter, terutama pada lembaga pendidikan, hingga sejumlah tokoh besar memberikan sanjungan terhadapnya. Mahatma Gandhi, misalnya, pernah menyebut tentang salah satu dari tujuh dosa fatal, yakni pendidikan tanpa karakter (*education without character*). Dr. Martin Luther King juga tak lalai menegaskan bahwa kecerdasan ditambah karakter merupakan tujuan akhir dari pendidikan sebenarnya (*intelligence plus character is the goal of true education*). Tak ketinggalan pula Theodore Roosevelt mengingatkan betapa mendidik seseorang semata dalam aspek kecerdasan intelektual dan bukan aspek moral adalah menyemai ancaman bagi masyarakat (*to educate a person in mind and not in morals is to educate a menace to society*).

SIMPULAN

Pancasila, sebagai salah satu dari empat pilar kehidupan berbangsa serta bernegara (selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika), sejatinya harus serba hadir menyertai perjalanan maupun pergulatan hidup bangsa Indonesia. Namun, realitas justru menunjukkan betapa Pancasila kian diabaikan dan dilupakan. Akibatnya, beragam masalah pelik dan problematika kebangsaan pun silih berganti mendera negeri. Oleh sebab itu, tak ada pilihan selain kembali pada Pancasila, menyemainya hingga mengakar di sanubari kaum muda sebagai generasi penerus bangsa, demi tetap kokohnya persatuan dan kesatuan Indonesia.

Apakah yang bisa dilakukan demi menyemai Pancasila hingga mengakar di sanubari kaum muda sebagai generasi penerus bangsa? Salah satu unsur di sekolah yang dapat diberdayakan adalah Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Mengapa OSIS? Jawabannya karena, sebagai satu-satunya organisasi resmi kesiswaan di sekolah, OSIS dan segenap jajaran pengurusnya berpotensi mengambil peran signifikan dalam mempengaruhi sikap maupun perilaku siswa/i lainnya. Bila serentak digulirkan di sepenjuru Indonesia, maka dampaknya pun dipastikan sangat signifikan.

Dengan melibatkan OSIS dalam upaya menyemai Pancasila, tanpa disadari sesungguhnya

telah tercapai dua tujuan sekaligus, yakni semakin mengakarnya Pancasila di sanubari kaum muda dan terbentuknya sejumlah karakter unggulan. Beberapa karakter yang tampak nyata pada uraian sebelumnya, antara lain, peduli sosial, religius, toleransi, semangat kebangsaan, cinta tanah air, tanggung jawab, rasa ingin tahu, kreatif, kerja keras, dan mandiri.

Sehubungan dengan pembahasan pada bab-bab terdahulu, penulis menyampaikan sejumlah saran. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) di seluruh sekolah menengah (SMP/MTs/SMA/SMK/MA/MAK) sepenjuru Indonesia hendaknya didorong agar aktif berpartisipasi mendukung penyemaian nilai-nilai luhur Pancasila melalui keteladanan dari para pengurusnya dan beragam kegiatan keorganisasian. Pelaksanaan kegiatan yang dimaksudkan untuk menyemai nilai-nilai luhur Pancasila agar didampingi oleh guru atau pihak lain yang berkompeten demi memastikan efektivitas serta kesesuaiannya dengan nilai dan norma yang berlaku. Kegiatan penyemaian dan implementasi nilai-nilai luhur Pancasila, dengan mempertimbangkan kondisi sosial setempat, dapat pula melibatkan warga sekitar sekolah. Dengan demikian, lambat laun, Pancasila dapat mewabah dan menjangkiti masyarakat luas, sehingga beragam masalah pelik maupun problematika kebangsaan perlahan dapat dituntaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2006, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aryani, I.K. 2010, *Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Erwin, M. 2010, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Penerbit Refika Aditama.
- Hasan, S.H., 2010. *Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai - Nilai Budaya Untuk Membentuk Daya Saing Dan Karakter Bangsa*. Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan, Pusat Kurikulum, Kementerian Pendidikan Nasional RI.
- Narwoko, J.D. 2006, *Sosiologi: Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta : Kencana.
- Octaviani, L., 2013. *Pandatarata Dan Jarlatsuh: Model Pendidikan Multikultural Di SMA Taruna*

- Nusantara Magelang, Jurnal Komunitas 5 (1): 112-127.
- Putra, R. M.S. (ed.). 2010, Etika Dan Tertib Hidup Berwarga Negara. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Sunarto, K. 2004, Pengantar Sosiologi. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Sutrisno, S. 2006, Filsafat Dan Ideologi Pancasila. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Syarbaini, S. 2010, Implementasi Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu.
- Ujan,A.A.2011, Multikultural: Belajar Hidup Bersama dalamPerbedaan. Jakarta : Penerbit PT Indeks.
- Wahyu, 2011.Masalah dan Usaha Membangun Karakter Bangsa, Jurnal Komunitas 3(2): 138-149.